

Dua Anggota DPR Calon Tersangka

Korupsi Dana Bansos KONI Kalbar

PONTIANAK—Dua anggota

DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat Zulfadli dan Usman Jafar menjadi calon tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI Kalbar 2006-2008. Penetapan keduanya tinggal menunggu kelengkapan alat bukti yang kini

tengah dikumpulkan penyidik Polda Kalbar.

"Iya (Zulfadli dan UJ). Tapi kita akan lengkapi pemeriksaan untuk melengkapi dua alat bukti. Kalau semua sudah cukup maka akan segera ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Reserse

Kriminal Khusus Polda Kalbar Komisaris Besar Wildhan Dhani, Rabu (27/6) di Pontianak.

Penyidik Polda Kalbar sendiri sudah melakukan gelar perkara pada 19 Juni lalu untuk menentukan tersangka tambahan dalam kasus Bansos KONI. Sementara

tersangka yang sudah ditetapkan tetap masih satu orang. Yakni mantan Wakil Bendahara KONI Kalbar, Iswanto. Kini berkas kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun polisi belum mendapatkan petunjuk atas berkas yang telah dilimpahkan

tersebut.

Kerugian negara akibat dugaan korupsi dana Bansos itu, sesuai hasil perhitungan kerugian negara BPK RI perwakilan Kalbar mencapai Rp15,24 miliar. Tersangka dalam kasus tersebut, menurut Direskrim Sus, dipas-

tikan bakal bertambah. Hanya saja masih dibutuhkan kelengkapan alat buktinya.

Dalam pengusutan dugaan korupsi dana Bansos, Polda Kalbar tidak hanya sebatas

◆ Ke Halaman 7 Kolom 5

Sambungan dari halaman 1

menyelidiki dana bantuan kepada KONI. Tetapi juga Bansos untuk dewan pembina fakultas kedokteran Universitas Tanjungpura. Dalam penyelidikannya, Polda menemukan dari total bantuan Pemprov ke Dewan Pembina fakultas kedokteran sebesar Rp 25 miliar, ditemukan penyalahgunaan sebesar Rp 5 miliar yang dipinjamkan ke Ketua DPRD Provinsi Kalbar periode 2004-2009, melalui Sekda. Penyidik telah melakukan penyitaan dana yang dipinjam sebesar Rp 5 miliar tersebut.

Direskrim Sus menambahkan, untuk pemeriksaan dua anggota DPR, jika sudah ditetapkan menjadi tersangka, turut dibutuhkan izin Presiden. Karena status keduanya adalah pejabat negara. "Kalau dulu (Zulfadli dan UJ) sudah pernah diminta keterangan. Tapi kapasitas mereka masih sebagai

saksi. Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka surat izin ke Presiden akan kembali diajukan melalui koordinasi dengan Bareskrim," kata Direskrim. Munculnya kasus bansos ini bermula dari hasil audit reguler yang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008. Termasuk audit dana bansos tahun 2006 hingga tahun 2008.

BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO) terhadap laporan keuangan tersebut. Penyebab DO dikarenakan BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Dari hasil penelitian PDDT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses

oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK pusat. Hasilnya menemukan empat item penggunaan bansos bermasalah. Keempat item itu, temuan dana bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan. Uangnya digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada sekretariat daerah sebesar Rp 10,07 miliar.

Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Pra-PON sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp8,59 miliar. Serta yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 dan terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,11 miliar. (stm)